

KECAK BALI

Keadaan Cakrawala Bali



APBN & TKD
Triwulan III Tahun 2025

**MyIntress : Wujud Integrasi dan
Modernisasi Sistem Monitoring
Keuangan Negara**

**SKPP KPPN
Denpasar**

**Navigator
Fiskal**



Sekapur Sirih

Daftar Isi



TRIMO YULIANTO
KEPALA KPPN DENNPASAR

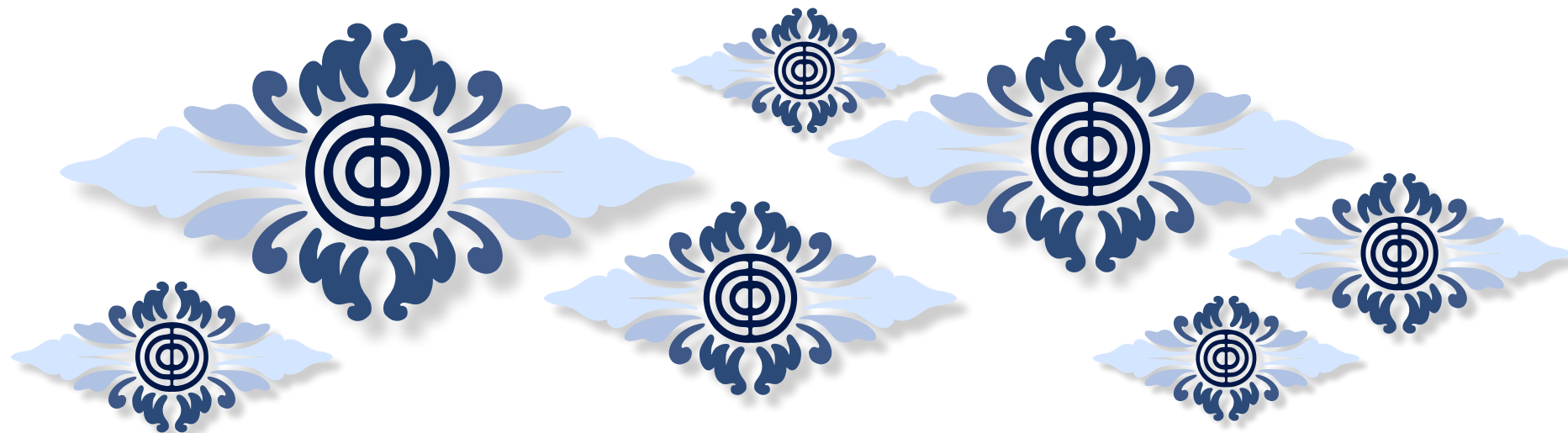
Buletin **KECAK BALI (KEadaan CAKrawala BALI)** Volume 4 Tahun 2025 kembali hadir menyajikan informasi seputar APBN, TKD, SKPP KPPN Denpasar, MyIntress : Wujud Integrasi dan Modernisasi Sistem Monitoring Keuangan Negara, dan Navigator Fiskal.

Beberapa informasi pada Buletin KECAK BALI Volume 4 Tahun 2025 antara lain Realisasi APBN dan TKD Triwulan 3 Tahun 2025 SKPP KPPN Denpasar, MyIntress : Wujud Integrasi dan Modernisasi Sistem Monitoring Keuangan Negara, dan Navigator Fiskal.

Informasi yang disajikan kiranya dapat memberikan pemahaman terhadap kontribusi dan peran KPPN Kota Denpasar dalam mengawal APBN di wilayah Kota Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (SARBAGITA) serta mewujudkan layanan perbendaharaan yang cepat, tepat, transparan, akuntabel dan tanpa biaya.

- ❖ 4. Realisasi APBN
- ❖ 5. Rincian Transfer ke Daerah (TKD)
- ❖ 8. SKPP KPPN Denpasar
- ❖ 10. MyIntress: Wujud Integrasi dan Modernisasi Sistem Monitoring Keuangan Negara

- ❖ 12. Rekam Pristiwa Triwulan III
- ❖ 14. Navigator Fiskal
- ❖ 16. TTS X Kuis KOK GratiSe

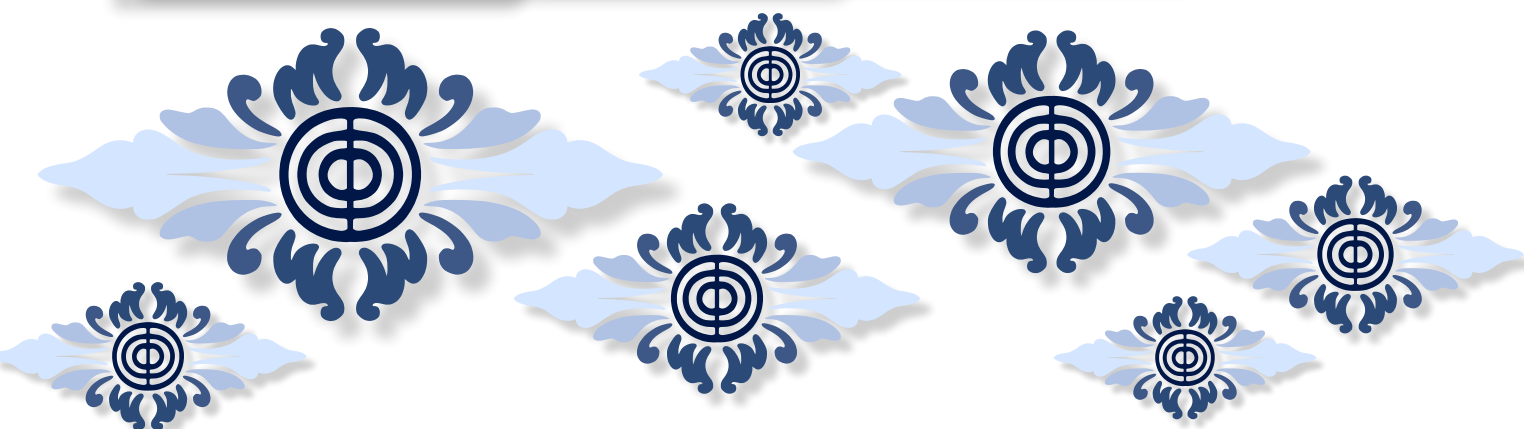


Realisasi APBN

 Belanja Pegawai	Pagu 3.696.891.623.000	Realisasi 2.786.740.693.257	Persentase 75 %
 Belanja Barang	Pagu 3.921.761.745.000	Realisasi 2.045.534.193.669	Persentase 52 %
 Belanja Modal	Pagu 1.088.916.539.000	Realisasi 290.019.989.019	Persentase 27 %
 Bantuan Sosial	Pagu 13.357.450.000	Realisasi 11.362.750.000	Persentase 85 %
 Transfer ke Daerah	Pagu 6.903.711.313.000	Realisasi 5.197.922.711.447	Persentase 75 %
 Total	Pagu 15.624.638.670.000	Realisasi 10.331.580.337.92	Persentase 66 %

Rincian Transfer ke Daerah (TKD)

 DAU	Pagu 4.096.941.835.000	Realisasi 3.132.777.357.652	Persentase 76 %
 DBH	Pagu 607.038.293.000	Realisasi 379.014.506.060	Persentase 62 %
 DAK Fisik	Pagu 208.578.005.000	Realisasi 99.552.058.976	Persentase 48 %
 BOK Puskesmas	Pagu 31.892.135.000	Realisasi 10.606.442.775	Persentase 33 %
 Dana Desa	Pagu 287.819.125.000	Realisasi 285.981.523.800	Persentase 99 %
 Insentif Fiskal	Pagu 121.378.543.000	Realisasi 121.378.543.000	Persentase 100 %
 DAK Non-Fiskal Lainnya	Pagu 788.522.057.000	Realisasi 419.039.338.600	Persentase 53 %
 BOSP	Pagu 761.541.320.000	Realisasi 742.339.638.478	Persentase 97 %
 Total	Pagu 6.903.711.313.000	Realisasi 5.190.689.409.341	Persentase 75 %





SKPP KPPN Denpasar

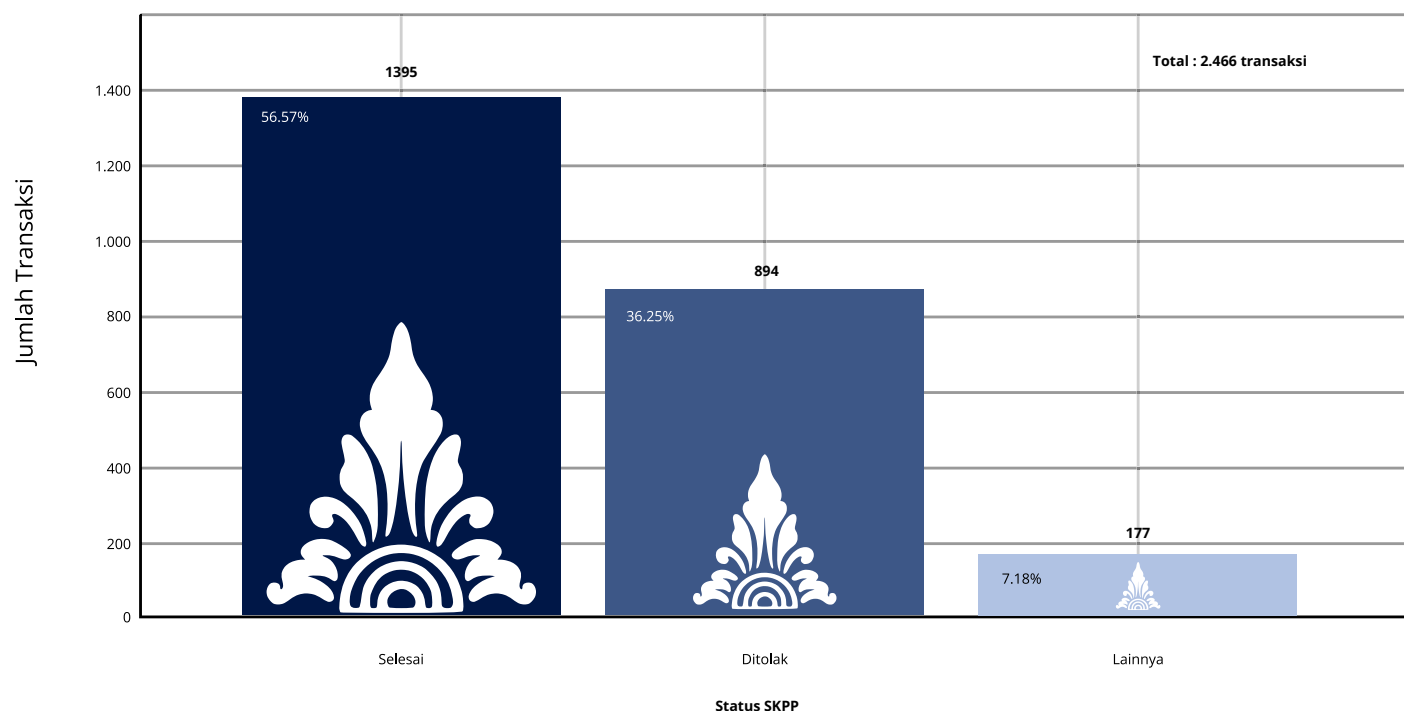
Oleh : Heru Supriyanto

Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan kerja sebagai dasar penghentian pembayaran gaji kepada pegawai negeri sipil, anggota TNI, maupun Polri yang mengalami perubahan status kepegawaian, pensiun, meninggal dunia, atau mutasi ke instansi lain. Dokumen ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi dan keuangan negara agar tidak terjadi pembayaran gaji yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan SKPP sudah dilakukan secara elektronik dan menjadi bagian dari transformasi digital dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Digitalisasi mempercepat proses administrasi, mengurangi potensi kesalahan manual, serta meningkatkan efektivitas pengawasan. Selain itu, penggunaan sistem elektronik mendukung terciptanya efisiensi waktu dan sumber daya, sekaligus memperkuat pelaksanaan prinsip good governance dalam pengelolaan APBN.

Selama periode Januari-Juni 2025, total sebanyak 2.466 pengajuan, transaksi SKPP telah diajukan dan di proses di KPPN Denpasar. Secara agregat, kinerja proses menunjukkan hasil yang relatif positif, dengan mayoritas transaksi berhasil diselesaikan. Namun, proporsi transaksi yang mengalami hambatan dalam bentuk penolakan, pembatalan, atau kesalahan prosedural tetap berada pada angka yang signifikan, yang mengindikasikan adanya area yang perlu intervensi segera.

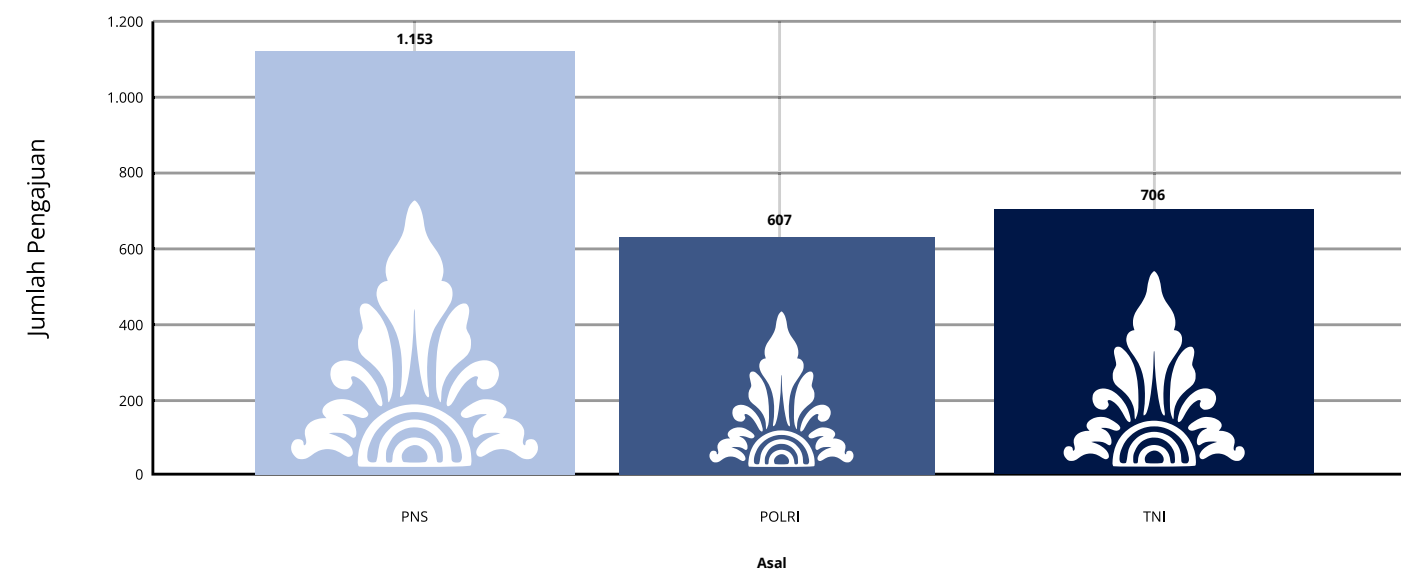
Berdasarkan analisis data periode Januari-Juni 2025, kinerja pengelolaan SKPP di Denpasar menunjukkan hasil yang relatif positif dengan tingkat keberhasilan sebesar 56,57%. Namun, angka ini harus dilihat sebagai sebuah gambaran persial, karena proporsi transaksi yang bermasalah signifikan. Secara agregat, terdapat 894 transaksi (36,25%) yang ditolak dan 111 (4,50%) yang dibatalkan. Tingginya angka penolakan dan pembatalan ini mengindikasikan adanya hambatan substantif dalam proses verifikasi dan kelengkapan dokumen, yang berpotensi menyebabkan keterlambatan penghentian pembayaran gaji dan menimbulkan risiko administrasi serta keuangan bagi negara dan personel yang bersangkutan.

Distribusi Transaksi Berdasarkan Status SKPP



Berdasarkan kelompok, terlihat setiap institusi memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda. Kelompok PNS, dengan kontribusi paling tinggi sebanyak 1.153 pengajuan, menunjukkan tren yang relatif stabil, tetapi dengan status pembatalan yang berulang. Sedangkan POLRI, menunjukkan pola yang fluktuatif, dengan lonjakan pada bulan Maret yang diikuti penolakan tinggi yang mengindikasikan adanya faktor musiman atau pengajuan massal. Disisi lain, TNI menghadapi tantangan di awal periode yang ditandai dengan tingginya error pada bulan Januari, mengindikasikan adanya masalah teknis atau pemahaman sistem yang perlu penanganan khusus.

Jumlah Pengajuan Berdasarkan Asal



Karakteristik pengajuan SKPP sangat dipengaruhi oleh jenisnya, di mana alasan Pindah (48,42%) dan Pensiun (46,15%) secara kolektif membentuk inti dari kerja KPPN. Fenomena ini mencerminkan bahwa tugas tugas KPPN secara fundamental ini mencerminkan bahwa tugas tugas KPPN secara fundamental berpusat pada mengelola transisi standar personel. Akan tetapi, angka penolakan yang signifikan pada kedua kategori dominan ini, yang terdapat tantangan yang dihadapi masing masing kelompok, mengindikasikan adanya titik rendah struktural dalam alur proses. Pada hakikatnya, temuan ini menggarisbawahi bahwa kendala pada aspek kelengkapan dokumen, kompleksitas, prosedur, dan sinergi yang belum optimal antar instansi telah mengurangi efisiensi operasional. Kondisi ini, pada gilirannya berpotensi mengganggu integritas dan kelancaran tata kelola administrasi kepegawaian serta keuangan negara, meskipun kapasitas pemrosesan transaksi dalam skala besar.

MyIntress: Wujud Integrasi dan Modernisasi Sistem Monitoring Keuangan Negara

Oleh : Eko Sasongko Putra

Aplikasi MyIntress merupakan inovasi digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sebagai bagian dari transformasi teknologi informasi Kementerian Keuangan. Aplikasi ini hadir untuk menjawab tantangan fragmentasi data, duplikasi informasi, dan rendahnya efisiensi akibat penggunaan banyak sistem yang berdiri sendiri. MyIntress, yang merupakan singkatan dari *My Integrated Treasury System*, dirancang untuk menjadi platform terintegrasi dalam melakukan monitoring, pelaporan, evaluasi, serta konsultasi terkait transaksi dan pelaksanaan APBN.

Selama ini, aplikasi seperti OMSPAN dan MonSAKTI telah menjadi tulang punggung pengelolaan data transaksi APBN. Namun, seiring dengan meningkatnya volume data, kompleksitas proses, dan kebutuhan integrasi yang lebih luas, muncul berbagai tantangan seperti keterlambatan akses data (data lag time), kesenjangan teknologi, dan duplikasi sistem. Di sinilah MyIntress hadir sebagai solusi terpadu untuk menggabungkan fungsi-fungsi utama kedua aplikasi tersebut dalam satu ekosistem digital yang lebih modern, efisien, dan user-friendly.



Dengan mengusung konsep single source of truth, MyIntress memastikan bahwa seluruh data keuangan pemerintah bersumber dari satu sistem yang valid, akurat, dan dapat diandalkan. Hal ini mendukung proses monitoring transaksi APBN dari tahap penganggaran hingga pertanggungjawaban secara lebih menyeluruh. Selain itu, aplikasi ini juga memberikan manfaat besar dalam efisiensi operasional TIK, penyederhanaan sistem informasi, dan peningkatan akurasi pengambilan keputusan.

Salah satu fitur unggulan MyIntress adalah Early Warning System, yakni sistem peringatan dini yang memberikan notifikasi otomatis ketika terdeteksi adanya potensi deviasi atau keterlambatan dalam pelaksanaan anggaran. Dengan fitur ini, para pengguna dapat segera mengambil langkah korektif sebelum masalah berkembang lebih jauh. Sistem juga dapat menyusun to-do list berbasis prioritas dan urgensi, membantu pengguna tetap fokus pada hal-hal yang memerlukan perhatian segera.

Selain fungsi monitoring dan peringatan dini, MyIntress juga dilengkapi dengan fitur pelaporan dan evaluasi yang menyederhanakan proses penyampaian data dan dokumen keuangan antarunit kerja. Proses pelaporan menjadi lebih cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga mendukung akuntabilitas serta memudahkan proses audit. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga memiliki fitur layanan konsultasi digital melalui integrasi dengan kanal HAI DJPb, yang memungkinkan komunikasi langsung antara pengguna dan tim teknis maupun kebijakan di pusat.

Keunggulan MyIntress tidak hanya terletak pada fungsionalitasnya, tetapi juga pada perannya dalam mendorong modernisasi dan simplifikasi sistem TIK DJPb. Aplikasi ini menjadi bagian penting dari cetak biru transformasi TIK tahun 2024–2029 yang berfokus pada tiga area strategis: Treasury Operation, Regional Economic Surveillance, dan Financial Advisor. Dengan demikian, MyIntress bukan sekadar aplikasi monitoring, melainkan pondasi bagi tata kelola keuangan negara yang berbasis data dan teknologi modern.

Melalui penerapan MyIntress, DJPb berkomitmen mewujudkan sistem perbendaharaan yang efisien, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Inovasi ini memperkuat posisi DJPb sebagai pengelola keuangan negara yang andal serta mendukung visi besar Treasury Goes Digital. Dengan integrasi data, peningkatan efisiensi, dan pengambilan keputusan berbasis informasi yang komprehensif, MyIntress menjadi simbol nyata transformasi digital menuju perbendaharaan modern untuk Indonesia yang maju.

Rekam Peristiwa Triwulan III

Juli



04 Juli : Kegiatan Family Day KPPN Denpasar



24 Juli : Rekonsiliasi Pajak Pusat atas
Belanja Daerah Smt I 2025



07 Agustus : Donor Darah



07 Agustus : Service Excellent by Mandiri



17 Agustus : Kegiatan Lomba Kemerdekaan

Agus- tus

Sept- ember



11 September : Surveillance Audit SMM ISO



23 September : Ujian Kompetensi



Navigator Fiskal

Oleh : Didi Afandi

Navigasi Fiskal di Tengah Ombak Penyesuaian Anggaran 2025

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Denpasar berdiri sebagai poros utama pengelolaan keuangan negara di Pulau Dewata. Sepanjang tahun anggaran 2025, peran institusi ini melampaui sekadar fungsi administratif; ia menjadi navigator fiskal yang memastikan setiap rupiah Dana Transfer ke Daerah (TKD) mengalir lancar, khususnya di tengah dinamika kebijakan anggaran nasional.

Pergeseran Kebijakan & Respon Daerah

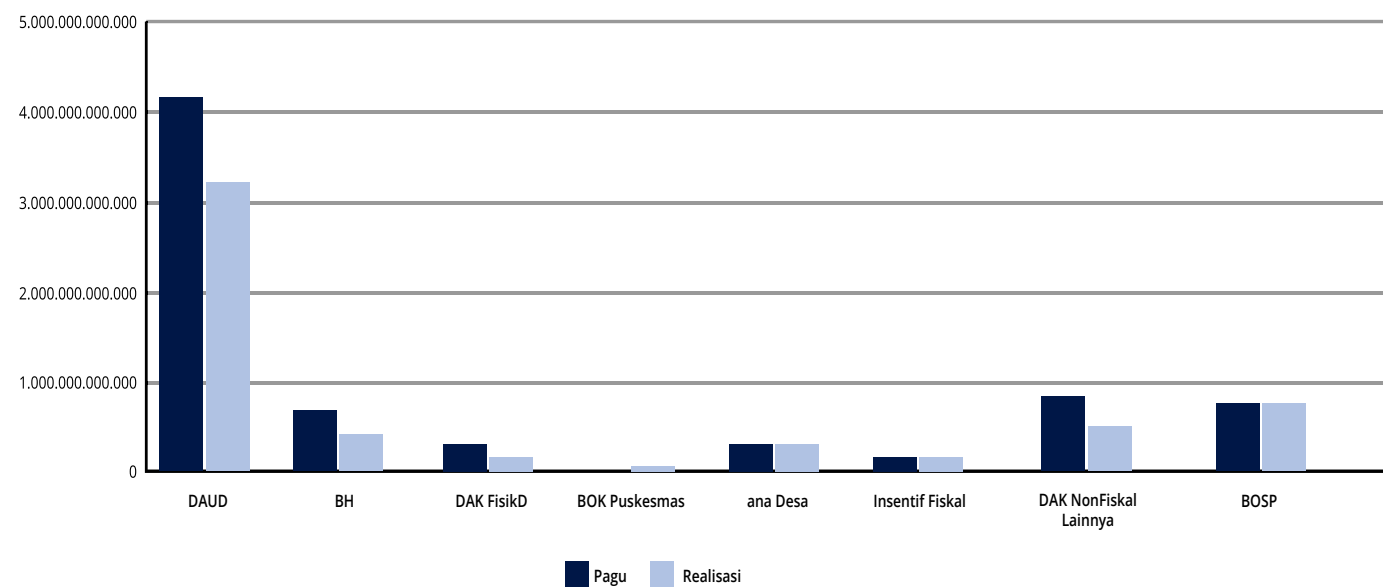
Tahun 2025 ditandai dengan instruksi efisiensi belanja negara dari pemerintah pusat, sebuah langkah yang menuntut penyesuaian signifikan pada alokasi TKD. Perubahan ini secara langsung berimplikasi pada perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di seluruh kabupaten/kota yang berada di bawah wilayah kerja KPPN Denpasar.

Alih-alih menunda pembangunan, tantangan ini justru mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menerapkan pengelolaan fiskal yang cerdas dan smart. KPPN Denpasar secara konsisten mendorong Pemda untuk meninjau ulang prioritas belanja, menunda pengadaan yang kurang mendesak, dan mengalokasikan sumber daya pada program yang memiliki dampak sosial dan ekonomi tertinggi. Namun, komitmen fundamental tetap terjaga: KPPN menjamin penyaluran dana untuk gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri tetap menjadi prioritas utama dan diproses tepat waktu.

Realisasi Dana Hingga Kuartal Ketiga

Hingga akhir Kuartal III (September) tahun 2025, KPPN Denpasar berhasil merealisasikan penyaluran TKD dengan angka yang mencerminkan kemajuan stabil dari alokasi yang ditetapkan. Meskipun terjadi penyesuaian pagu, total dana yang disalurkan per September mencapai estimasi sekitar **Rp5,19 triliun**.

Rekapitulasi Penyaluran TKD Tahun 2025



Dana monumental ini terdiri dari berbagai pilar pembiayaan daerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai dukungan umum bagi layanan publik esensial, Dana Desa dengan prioritas penggerak pembangunan dan pemberdayaan di tingkat desa, Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai penyeimbang ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dana dengan peruntukan spesifik, terutama DAK Fisik yang penyalurannya memerlukan sinergi intensif antara KPPN dan Pemda untuk memastikan proyek infrastruktur strategis berjalan tanpa hambatan.

Kolaborasi Strategis & Transparansi

KPPN Denpasar menempatkan diri bukan sekadar sebagai bendahara, tetapi sebagai mitra strategis fiskal daerah. Hal ini diwujudkan melalui serangkaian forum koordinasi reguler yang berfungsi untuk menyamakan langkah dan memecahkan kendala teknis penyaluran. Transparansi adalah inti dari operasional ini. KPPN secara berkala mempublikasikan laporan realisasi anggaran, memastikan akuntabilitas publik atas setiap dana yang dikelola. Selain itu, untuk mengatasi masalah klasik penumpukan dana di rekening kas daerah (RKUD), KPPN Denpasar gencar memberikan pendampingan dan apresiasi, secara aktif mendorong Pemda dengan kinerja terbaik untuk mempercepat belanja produktif yang langsung menyentuh denyut nadi perekonomian Bali.

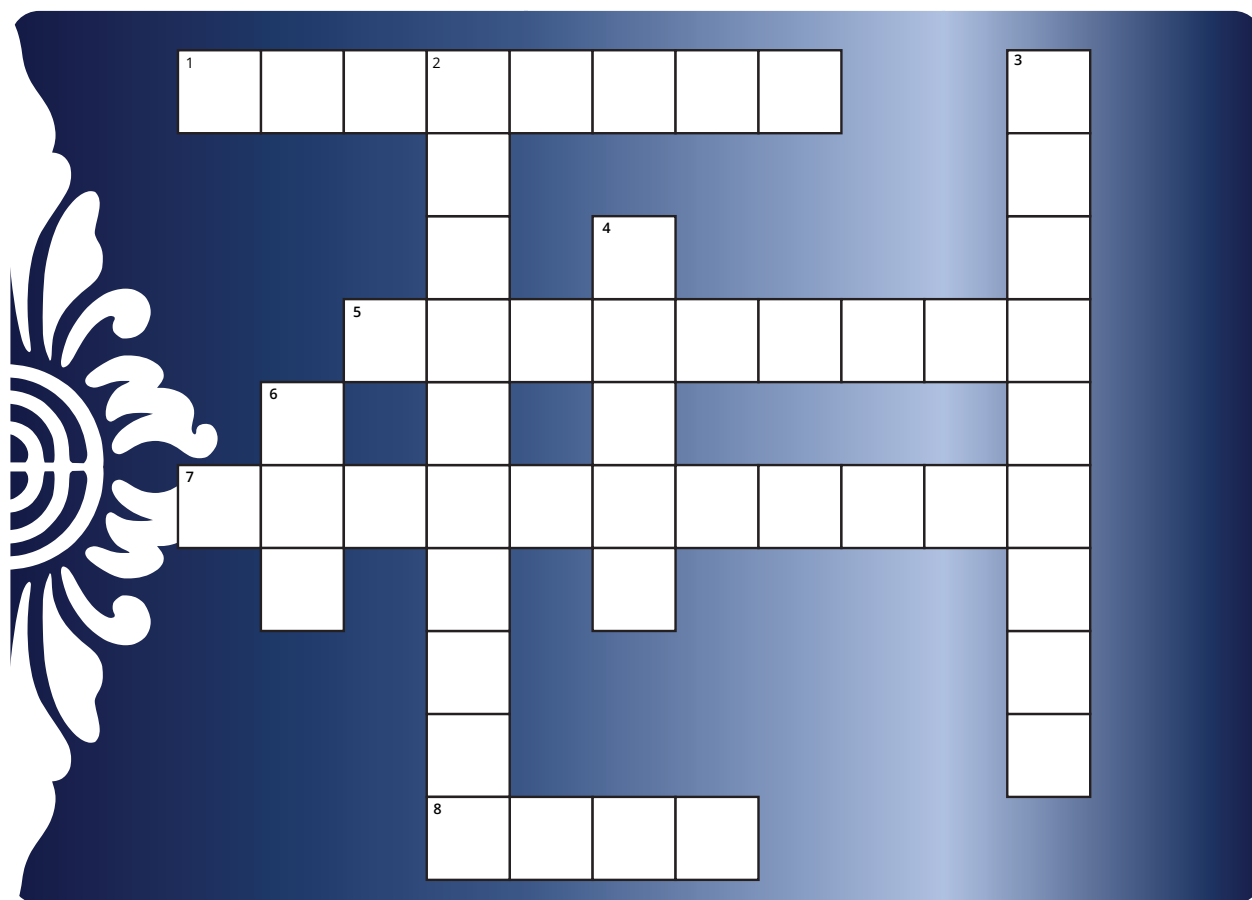
Akselerasi Menuju Kemandirian Fiskal Bali

Dinamika penyaluran TKD tahun 2025 di bawah pengawasan KPPN Denpasar adalah bukti nyata bahwa pembangunan di Bali terus berakselerasi meskipun di bawah tekanan penyesuaian fiskal. Dengan sinergi yang kuat antara KPPN, Pemda, dan dukungan DPRD, dana transfer ini diharapkan menjadi katalis utama untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. KPPN Denpasar akan terus berdiri di garis depan, memastikan bahwa visi pembangunan Bali yang mandiri, sejahtera, dan berkelanjutan dapat terwujud, dari pusat kota hingga pelosok desa.



TTS X Kuis KOK GratiSe

(Kode Etik, Gratifikasi, & WISE)



Mendatar

1. Nomor yang digunakan sebagai identitas pelapor dalam melakukan komunikasi tidak langsung antara pihak pelapor dengan penerima laporan (IBI, UKI, UT) yang didapatkan setelah pelapor menyampaikan laporan pelanggaran melalui aplikasi WISE
5. Berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas termasuk kode etik dan kode perilaku nilai . . .
7. Unit Pengendali Gratifikasi yang berfungsi mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Keuangan disebut UPG . . .
8. Dokumen resmi yang diterbitkan untuk menghentikan pembayaran gaji pegawai yang pensiun atau mutasi

Menurun

2. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma kesopanan dan norma kesusilaan yang dapat menurunkan citra Pegawai dan/atau organisasi termasuk kode etik dan kode perilaku nilai . . .
3. Sistem monitoring terintegrasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melakukan monitoring, pelaporan, evaluasi, serta konsultasi terkait transaksi dan pelaksanaan APBN
4. Pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/ agama lainnya lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi ... dilaporkan
6. Salah satu unsur pengaduan yang menjelaskan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan (modus, cara, dsb.)

Selamat untuk pemenang Teka Teki Silang X Kuis KOK GratiSe
Kecak Bali Vol.3/2025
Febriani Pali Tinting
email: tintingfebrianipali@gmail.com

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Sudah Lapor Pak Menkeu?

082240406600 (WA Only)

Setelah lapor, tunggu konfirmasi resmi hanya dari nomor ini:

08159966662

Hati-hati penipuan!

kemenkeu.go.id

Meet the Team

KECAK BALI
VOL.4/2025

Trimo Yulianto
Penanggung Jawab

Niko
Pimpinan Redaksi

Putu Gede Andi Yustira. M
Kontributor

Galuh Ajeng Aulia
Kontributor

Devika Yulan
Kontributor

Intan Radha Habsyiah
Kontributor

Embun Nurani Wulandari
Kontributor

Md. Gd Satya
Layout & Desain